

Buletin Bulanan

Edisi Maret 2019

DARI REDAKSI

Puji syukur kami panjatkan atas terbitnya Buletin Edisi Maret 2019 yang diharapkan dapat menjadi media informasi internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Buletin ini menyajikan informasi berbagai kegiatan yang telah dilakukan masing-masing unit kerja di DJPI pada bulan Maret 2019 antara lain DJPI Ikut Serta dalam Pameran PUPR 4.0 Inovasi Teknologi, Ditjen SDA dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Sepakati *Pilot Project* KPBU Bidang Sumber Daya Air, Pelantikan Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pembahasan Rapat Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan II, dan Upaya Percepatan Penyelenggaraan KPBU. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca buletin bulanan ini.

DAFTAR ISI

DJPI Ikut Serta dalam Pameran PUPR 4.0 Inovasi Teknologi.....	1.
Pelantikan Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.....	2.
Pembahasan Rapat Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan II.....	2.
Ditjen SDA dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Sepakati Pilot Project KPBU Bidang Sumber Daya Air.....	3.
Upaya Percepatan Penyelenggaraan KPBU.....	3.
Pemantauan dan Evaluasi Proyek KBPU Bidang Jalan dan Jembatan.....	4.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Dilarang mengutip, mempublikasikan atau mereproduksi konten buletin ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari penerbit.
Hak cipta dilindungi undang-undang.



DJPI Ikut Serta dalam Pameran PUPR 4.0 Inovasi Teknologi

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) ikut serta dalam Pameran PUPR 4.0 Inovasi Teknologi yang dilaksanakan pada hari Senin-Jumat, tanggal 4-8 Maret 2019 bertempat di Gedung Serbaguna, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Untuk kegiatan talkshow pada pameran tersebut, DJPI menampilkan narasumber Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Herry Trisaputra Zuna dan Presiden Direktur PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan yang dimoderatori Direktur Proyek Sektor Jalan dan Jembatan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPI) Max Antameng.

Dalam pameran tersebut DJPI menampilkan 3 (tiga) aplikasi, yaitu aplikasi Rumah Indonesia (RUMI), Rumah Subsidi (RUSDI) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONA). Aplikasi RUMI adalah aplikasi pendataan *mobile* yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR untuk mempermudah masyarakat terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/POLRI untuk mendapatkan program pembiayaan perumahan. Untuk kedepannya, fitur RUMI akan dikembangkan untuk aplikasi multifungsi seperti pembelian rumah. RUMI dapat diunduh (download) pada *playstore*. RUSDI adalah bagian dari aplikasi RUMI yang menampilkan informasi rumah subsidi Pemerintah yang bekerjasama dengan pengembang perumahan. SIMONA adalah sistem informasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan guna pemenuhan kebutuhan laporan bantuan pembiayaan perumahan yang bersifat *real-time* dan *databasanya* dapat diakses dimanapun. SIMONA dapat diakses melalui *web browser* <http://simona.pembiayaan.pu.go.id>

Sebagai informasi, Pameran PUPR 4.0 diikuti oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR. Pada tanggal 4-8 Maret 2019, pameran diikuti oleh DJPI, Direktorat Penyediaan Perumahan, dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP). Pameran tersebut bertujuan untuk menunjukkan kinerja setiap lembaga atau unit kerja terutama bidang inovasi teknologi informasi.

Pelantikan Pejabat Pengawas di Lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D. Heripoerwanto melantik 51 Pejabat Pengawas di lingkungan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI). Pelantikan tersebut dimaksudkan untuk mengisi posisi dalam rangka pelaksanaan tugas di DJPI. Pada hari Senin (11/3) bertempat di Gedung Pendopo, Kementerian PUPR.

Kegiatan pelantikan pejabat setiap instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan organisasi guna pembenahan, pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi dalam rangka kinerja penyelenggaraan tugas dan pelayanan umum, serta merupakan bagian dari pola pembinaan karier pegawai. DJPI, merupakan organisasi dengan tuisi yang diperluas dan sangat berbeda dari organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan.

“Sesuai arahan pimpinan. DJPI sebagai simpul KPBU, sedangkan sistem pembiayaan perumahan ditangani oleh satu direktorat. Hal ini perlu diperhatikan oleh semua SDM yang ada termasuk pejabat pengawas yang baru dilantik, agar saudara-saudara perlu menambah pengetahuan dan kemampuan terkait KPBU,” ujar Dirjen.

Lebih lanjut Ditjen Pembiayaan Infrastruktur berharap para pejabat pengawas yang baru dilantik menjadi sumber daya yang sangat penting membantu pimpinan mengelola tuisi dengan cara yang cerdas, cermat dan berhasil guna secara optimal. Sehingga pembentukan organisasi ini, dapat benar-benar berfungsi dan mencapai apa yang diharapkan pimpinan kementerian. Pelantikan pejabat pengawas tersebut sebagai kelanjutan pelantikan Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, dan Pejabat Administrator yang diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2019 lalu.

Pembahasan Rapat Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan II

Pola Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) kini sedang gencar digaung-gaungkan oleh Pemerintah sebagai alternatif solusi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk itu Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) melakukan pembahasan Proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan II, Rabu (6/3) bertempat di ruang rapat DJPI.

Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan dihadiri oleh para pejabat di Lingkungan DJPI, Perwakilan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Perwakilan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), serta Tim KPBU PJT II.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai progres pelaksanaan dan rencana kerja proyek KPBU SPAM Regional Jatiluhur I dan II. Proyek SPAM Jatiluhur I merupakan bentuk kerjasama *Built Operate Transfer* (BOT) selama 30 tahun melalui mekanisme kerjasama KPBU *Unsolicited* untuk kapasitas 5.000 I/dkt dengan perkiraan investasi Rp2,1 Triliun. Badan Usaha Pemrakarsa proyek ini adalah Konsorsium PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT. Tirta Gemah Ripah dan PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Rencana dan jadwal Proyek SPAM Jatiluhur I akan memakan waktu 4 tahun, terhitung tahun 2019-2022.

Dalam pertemuan ini disampaikan, Direktorat Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Permukiman, DJPI bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum akan terus mengawal proses KPBU SPAM Regional Jatiluhur I yang saat ini dalam proses pelaksanaan pembahasan PKS antara Kementerian PUPR dan Pemda.



Ditjen SDA dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Sepakati *Pilot Project* KPBU Bidang Sumber Daya Air

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan terus melakukan koordinasi dengan beberapa unit organisasi mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Untuk itu diselenggarakan pembahasan dengan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) di Ruang Rapat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI), Rabu (13/3). Rapat ini dibuka oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto dan dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Sumber Daya Air (PPI SDA) Arvi Argyantoro. Acara tersebut dilaksanakan selain untuk berkoordinasi juga membahas progres, kendala, isu dan tindak lanjut penyelenggaraan KPBU bidang sumber daya air dengan Ditjen SDA.

Dalam kesempatan tersebut disampaikan mengenai rencana Ditjen SDA bersama DJPI mengenai kesepakatan pembangunan bendungan Muara Juloi, Kalimantan Tengah sebagai *pilot project* KPBU bidang SDA. Pembangunan Bendungan Muara Juloi, Kalimantan Tengah ini memiliki potensi 284 MegaWatt, dengan perkiraan biaya konstruksi RP 6 triliun.

Direktorat PPI SDA juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Penatagunaan SDA dalam pemanfaatan infrastruktur SDA untuk PLTA/PLTN/PLTMH/PLTS yang memiliki potensi menjadi proyek KPBU. Selain itu disampaikan pula bahwa pemanfaatan sumber daya air merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengelola sumber daya air dalam rangka pemenuhan hajat hidup masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya air, dapat dilaksanakan dari sumber air yang sudah dibangun (Aset Kementerian PUPR) dan sumber air lainnya (pembangunan baru).

Adapun terkait rencana KPBU bidang SDA yang akan dilaksanakan oleh Ditjen SDA bersama DJPI adalah pembangunan Bendungan Muara Juloi, Kalimantan Tengah, dan Sistem Penyediaan Air Baku Kertasari, Kabupaten Bandung, saat ini keduanya sedang dalam tahap penyusunan prastudi kelayakan (OBC).

Hadir dalam acara tersebut pejabat dari lingkungan DJPI yaitu Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Kabag Anggaran dan Evaluasi, Kasubdit Penyiapan Kerjasama, dan para Pengawas dan Staf di lingkungan Dit. PPI SDA. Turut hadir Kasubdit Pemanfaatan SDA dari Ditjen Sumber Daya Air.



Upaya Percepatan Penyelenggaraan KPBU

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D.Heripoerwanto secara resmi membuka pelatihan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Senin (4/3) di Balai Diklat III Jakarta. Pelatihan tersebut dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang I dilaksanakan tanggal 4 - 6 Maret 2019, gelombang II dilaksanakan tanggal 13 - 15 Maret 2019, dan gelombang III dilaksanakan tanggal 18 - 20 Maret 2019.

Adapun maksud pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dalam mendukung percepatan pelaksanaan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan. Dengan diadakannya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman personil ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) tentang kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang menjadi dasar transformasi organisasi Direktorat Jenderal Pembiayaan

Perumahan menjadi DJPI. Diharapkan fokus dalam mengawal pelaksanaan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan.

Acara Diklat yang dilaksanakan selama tiga hari ini diawali dengan Pembukaan dan Pengarahan Program, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pre- test mengenai KPBU, kemudian pada hari pertama materi yang disampaikan mengenai dasar - dasar KPBU dengan narasumber Bapak Herry Trisaputra Zuna, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, yang dilanjutkan dengan materi mengenai Teori Manajemen Resiko dan Rencana Usaha dengan narasumber Bapak Andre Permana, PhD, EVP Project Appraisal PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII), pada hari berikutnya disampaikan mengenai Monitoring dan Evaluasi Proyek KPBU dengan narasumber Bapak Gunsairi, MPM, Fungsional Perencana Madya Kementerian PPN/Bappenas dan pada hari terakhir disampaikan materi mengenai pelaksanaan KPBU oleh Ibu Ananda Laksmi, Project Development Staff, PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang diakhiri dengan pelaksanaan Post test tentang KPBU.

Melalui kegiatan Diklat KPBU, diharapkan khususnya SDM DJPI dalam masa transisi, siap menjalankan tugas dan fungsi yang salah satunya terkait dengan pelaksanaan KPBU bidang pekerjaan umum dan perumahan.

PELINDUNG

Dr. Ir. Eko D Herpoerwanto, MCP

PENASEHAT

Ir. Irma Yanti, MT

PENGARAH

- Ir. Herry Trisaputra Zuna, SE, MT
- Ir. Arvi Argyantoro, MA
- Reni Ahiantini, ST, M.Sc
- Adang Sutara, SE, M.Si
- R. Haryo Bekt Martoyoedo, ST, M.Sc

PEMIMPIN REDAKSI

- Dedy Slamet Budisusetyo, SH, MT

REDAKTUR PELAKSANA

- Indah Pratiwi, S.Sos. M.Si

REDAKSI

- Fenty Meilisya Syafril, S.Sos. M.Si

EDITOR

- Anggoro Widyastika, SH, MH
- Putrawan, SH

DESAINER

- Fahmi Nurhuda S.Ds
- Michael Adha

FOTOGRAFER

- Komarudin
- Dwi Cristianto

REPORTER

- Medika Yogi P, S.I. Kom
- Riyan Aditya P, S.I. Kom
- Shara Vadya, S.I. Kom

SEKRETARIAT DAN SIRKULASI

- Rubi Esti Aprillia, SH, MH
- Dony Triastomo, SE, MSi
- Yudhistira Adinugroho, SH

ALAMAT REDAKSI

Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
JL. Raden Patah 1 No. 1 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
Telepon/Fax: (021) 7200793

DITERBITKAN OLEH

Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 pembiayaan.pu.go.id

 Pembiayaan Infrastruktur PUPR

 Pemb_InfraPUPR

 Pembiayaan_Infrastruktur

 PembiayaanInfrastruktur

Pemantauan dan Evaluasi Proyek KBPU Bidang Jalan dan Jembatan

Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek KBPU di bidang Jalan dan Jembatan, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Eko D.Heripoerwanto melakukan peninjauan Proyek Pembangunan Jalan Tol Serang – Penimbang pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di Banten. Jalan Tol Serang-Panimbang merupakan jalan tol yang menghubungkan Serang dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, Banten. Jalan Tol Serang-Panimbang akan tersambung dengan Jalan Tol Jakarta-Merak.

Jalan tol ini memiliki panjang 83,6 KM dengan luas total 785 hektare. Jalan tol ini melewati Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan melewati 14 kecamatan dan 48 desa/kelurahan. Jalan tol ini digunakan untuk mendukung akses jalan menuju Taman Nasional Ujung Kulon serta Tanjung Lesung. Selain itu juga untuk mendukung akses pengiriman logistik/barang dari kawasan industri di Pandeglang, Banten hingga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Merak, Banten. Jalan Tol Serang-Panimbang sendiri di bagi menjadi 3 (tiga) seksi wilayah yaitu Seksi I Kota Serang-Rangkas Bitung sepanjang 26 KM dan telah secara rigid sepanjang 6 KM dilakukan pemasangan beton sedangkan 6 km ke bawah masih dalam tahapan pemasangan rancangan dan pondasi, Seksi II Rangkas Bitung-Bojong sepanjang 24,67 KM, dan Seksi III Bojong-Panimbang sepanjang 33 KM.

Pembebasan tanah sampai saat ini telah mencapai 97% di Kota dan Kabupaten Serang, di Kabupaten Lebak Baru mencapai 67%, sedangkan di Pandeglang baru mencapai 65%. Diharapkan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat mempercepat dan mempermudah proses pergantian dana talangan agar pihak pelaksana dapat melakukan *speed up* di musim panas ini.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi di lapangan dalam pembangunan proyek jalan Tol Serang-Panimbang, di sisi sebelah utara jalan tol masih ada permasalahan dalam pembebasan tanah masyarakat dan diperkirakan di tahun 2019 ini semua permasalahan tentang pembebasan tanah dapat terselesaikan dan terdapat sepanjang 4 KM kontur tanah organik dan lunak yang mencapai kedalaman sampai 20-30 meter, diperlukan waktu yang cukup lama dalam mengatasi permasalahan tanah organik dan lunak ini.